

LAKIP 2024

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH





LAKIP

2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**# bangga
melayani
bangsa**

**# Ber
AKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Address

Jl. Veteran, Komplek Perum
Hegarmanah Kel. Ciseureuh, Kec.
Purwakarta, Kab. Purwakarta,
Jawa Barat 41118



Contact

Call: (0264) 201019
Fax: (0264) 201019



Email:
bkpsdm@purwakartakab.go.id

KATA PENGANTAR

Purwakarta, 31 Januari 2025

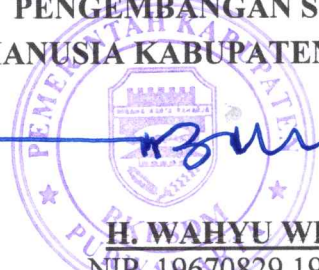
Assalammu'alaikum wr.wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat selesai tepat waktu. LAKIP disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penerbitan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan (*Continously Improvement*).

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**



H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	
• Latar Belakang	1
• Dasar Hukum	2
• Tujuan Pelaporan Kinerja	3
• Gambaran Umum	3
• Aspek Strategi Organisasi	11
• Permasalahan Utama	11
• Tindak Lanjut SAKIP	12
• Keadaan Sarana dan Prasarana	13
• Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
• Rencana Strategis	16
• Rencana Kinerja Tahunan	20
• Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
• Capaian Kinerja Organisasi	
❖ Capaian Kinerja Tahun 2024	38
❖ Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	41
❖ Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD...	47
❖ Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan Instansi Sejenis	49
❖ Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	52
❖ Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Analisis Kinerja	68
❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
• Realisasi Anggaran	87
BAB IV PENUTUP	
• Kesimpulan	92
• Saran	93
LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
• Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	
• Laporan Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024 – Sekretariat	
• Laporan Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024 – Bidang Pengadaan	
• Laporan Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024 – Bidang Pengembangan SDM	
• Laporan Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2024 – Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	
• Notulen rapat evaluasi Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

NO.	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Pelayanan di BKPSDM Kabupaten Purwakarta	8
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026	18
Tabel 2.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Periode 2024-2026	21
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan berdasarkan Sasaran	30
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	38
Tabel 3.3	Perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024	41
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	47
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional	50
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Dengan Standar Provinsi	50
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Dan Solusi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	53
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program	56
Tabel 3.9	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1	68
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	68
Tabel 3.11	Rekapitulasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Keterangan Belajar	70



NO.	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 3.12	Rekap Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Tahun 2024	71
Tabel 3.13	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2	73
Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Sistem Merit Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan Tahun 2024	73
Tabel 3.15	Rekap Rincian Pemberhentian Tahun 2024	79
Tabel 3.16	Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3	82
Tabel 3.17	Perolehan Nilai SAKIP Tahun 2023	82
Tabel 3.18	Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024	86
Tabel 3.19	Realisasi Belanja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	87
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	87



DAFTAR GAMBAR



NO.	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1.	SOTK BKPSDM Kabupaten Purwakarta	5
Gambar 2.	Klasifikasi Berdasarkan Gender	6
Gambar 3.	Klasifikasi Jabatan	6
Gambar 4.	Tingkat Pendidikan Pegawai	7
Gambar 5.	Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	8
Gambar 6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	45
Gambar 7.	Diklat Evaluasi SAKIP	69
Gambar 8.	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	69
Gambar 9.	Diklat PKN	70
Gambar 10.	Diklat PKA	71
Gambar 11.	Diklat PKP	71
Gambar 12.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	72
Gambar 13.	Diklat Prodi Profesi Pamong Praja	72
Gambar 14.	Diklat PPNS	72
Gambar 15.	Klasifikasi Pendidikan ASN Kabupaten Purwakarta	75
Gambar 16.	Pelantikan PPPK Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023	75
Gambar 17.	Pelantikan Direktur RSUD Bayu Asih	76
Gambar 18.	Pelantikan Pejabat Adminstrator	77

NO.	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 19.	Pelantikan Lulusan P K N - S T A N Dan I P D N	77
Gambar 20.	Grafik Penyelesaian Hukuman Disiplin Kab. Purwakarta	78
Gambar 21.	Monitoring dan Sosialisasi Pencegahan pelanggaran Netralitas ASN	78
Gambar 22.	Rapat Dewan Kehormatan	78
Gambar 23.	Grafik ASN Yang Pensiun Th.2024 Berdasarkan Jenis Pemberhentian	80
Gambar 24.	Grafik ASN Yang Pensiun Th.2024 Berdasarkan Gol/Pangkat	80
Gambar 25.	Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi Tahun 2024	80
Gambar 26.	Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	80
Gambar 27.	Pelaksana Selkom CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024	81
Gambar 28	Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	85

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, selalu berkomitmen melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

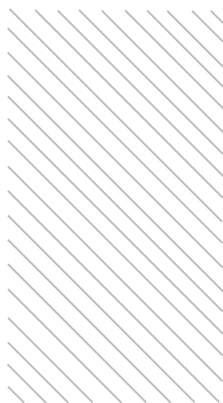
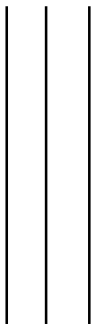
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban tersebut, maka disusun LAKIP BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis BKPSDM Kabupaten Purwakarta serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan, secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan sebanyak 3 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mendapatkan kategori **Melampaui** dengan rata-rata tingkat capaian sebesar **118,87%**.
2. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan didukung oleh 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan rata-rata tingkat capaian **112.56%** atau **Melampaui**.
3. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut atau untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta **Rp. 34.923.765.892-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.658.260.215-** atau **62,02%**.
4. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan.
5. Secara umum kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

LAKIP BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan sehingga masih perlu mendapat

kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LAKIP di masa yang akan datang.

Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada masa yang akan datang. Akhirnya, terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LAKIP BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024, berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta) saat ini dituntut untuk membuat laporan kinerja selama tahun 2024.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah BKPSDM Kabupaten Purwakarta, dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari setiap pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja sekaligus menjadi sasaran terhadap beberapa hal, seperti:

- a. Responsivitas, yaitu mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan, semakin banyak kebutuhan pelayanan yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik.
- b. Responsibilitas, yaitu menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisit dan eksplisit, dimana semakin kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
- c. Akuntabilitas, yaitu merupakan pertanggungjawaban organisasi kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bidang pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dan pelanggan lainnya. Beberapa indikator ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang perubahan Perangkat Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
- i. Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- j. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.



1.3 Tujuan Pelaporan Kinerja

BKPSDM Kabupaten Purwakarta diwajibkan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP BKPSDM Kabupaten Purwakarta tersebut adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan.

1.4 Gambaran Umum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten Purwakarta) yang awalnya bernama Badan Kepegawaian dan diklat Daerah Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Setelah penyesuaian nomenklatur sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

TUGAS

“Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang Menjadi Kewenangan Daerah”

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah Sebagai berikut:

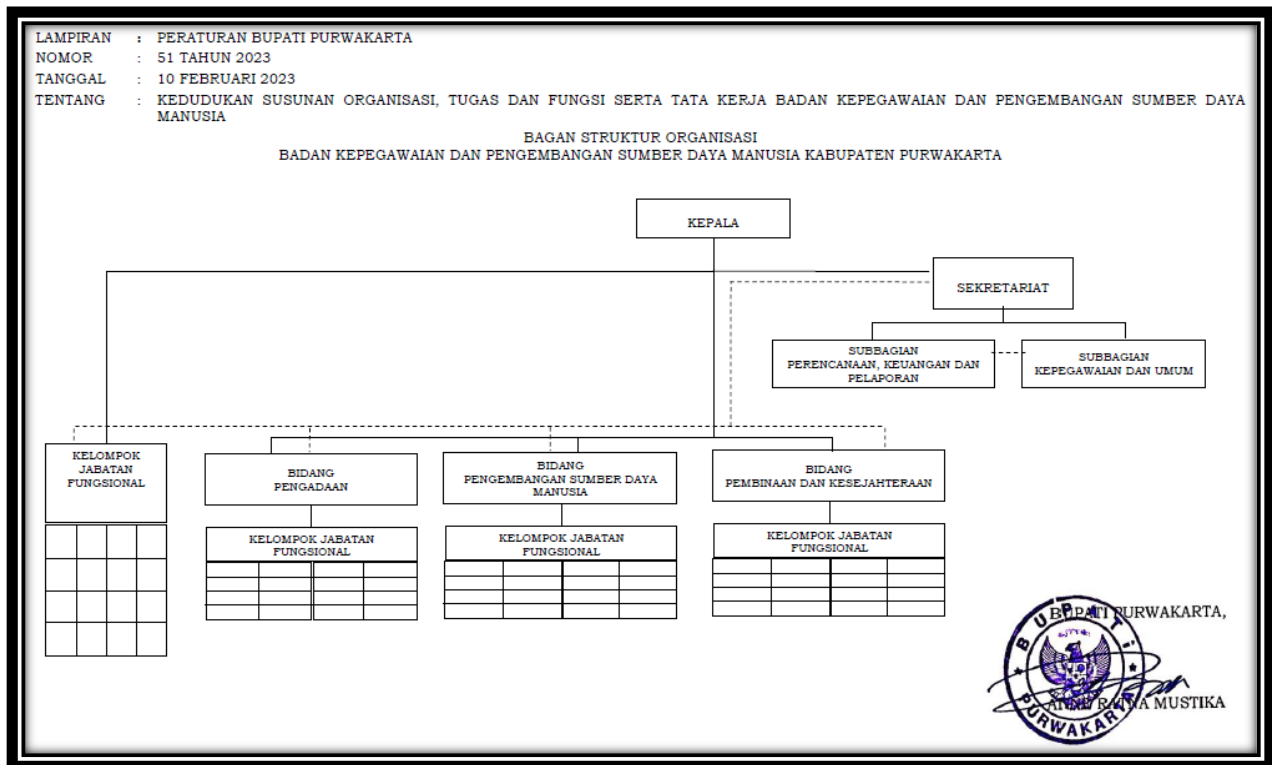
- a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023. Terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Pengadaan dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dan Kelompok Jabatan Fungsional:
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



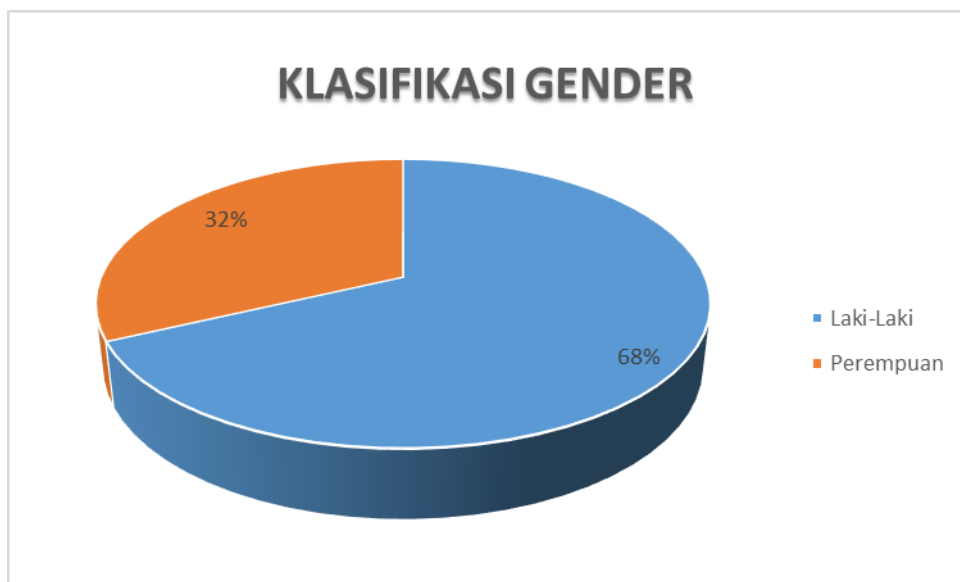
Gambar 1. SOTK BKPSDM Kabupaten Purwakarta

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

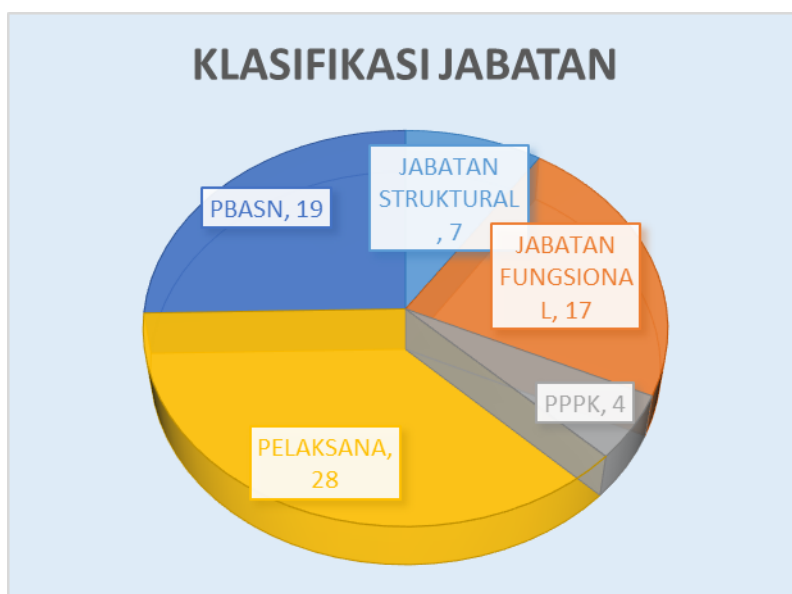
Salah satu persyaratan utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM Aparatur yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 didukung oleh jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 75 orang. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 56 ASN dan 19

Non ASN. Klasifikasi berdasarkan gender, tingkat pendidikan, pangkat dan jabatan dapat di lihat sebagai berikut:



Gambar 2. Klasifikasi Berdasarkan Gender

Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan gender, perbandingan Pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 yaitu di dominasi oleh laki-laki sebanyak 51 orang atau 68% sedangkan perempuan 32% atau 22 orang.



Gambar 3. Klasifikasi Jabatan

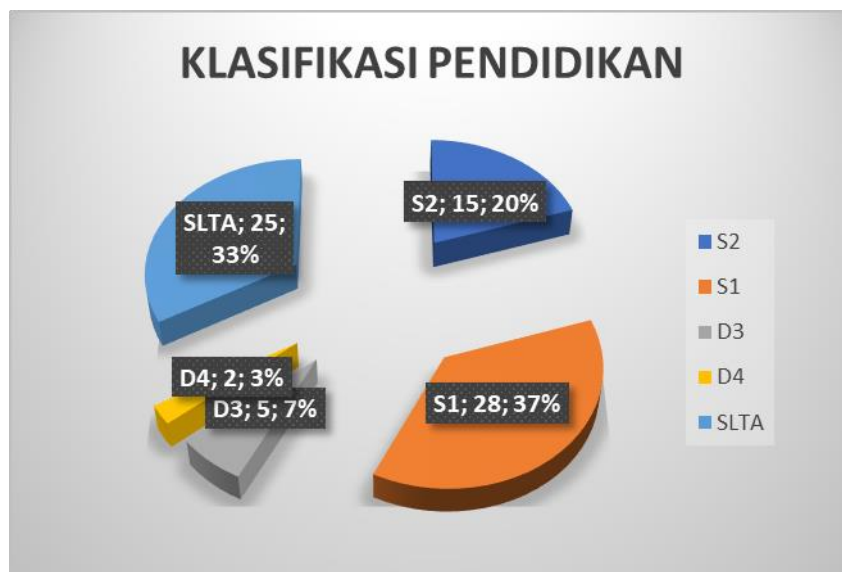
Untuk tenaga ASN pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 terdiri dari Jabatan Manajerial yaitu JPT 1 orang, Jabatan Administrator berjumlah 4 orang, Jabatan Pengawas

berjumlah 2 orang, dan jabatan non manajerial sebanyak 49 orang yang terdiri Jabatan Fungsional 21 orang dan Jabatan Pelaksana berjumlah 28 orang, serta tenaga Non ASN berjumlah 19 orang.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, Aparatur Sipil Negara dalam lingkup BKPSDM Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

1. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi (setingkat eselon II.b);
2. Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III.a);
3. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III.b);
4. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas (setingkat eselon IV.a);
5. Jabatan Fungsional;
6. Jabatan Pelaksana.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta memiliki tingkat pendidikan SLTA, D3, D4, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada diagram berikut.



Gambar 4. Tingkat Pendidikan Pegawai

Dari gambar diatas menunjukan tingkat pendidikan S1 sebanyak 28 Orang (37%) dan S2 sebanyak 15 Orang (20%), hal ini menggambarkan bahwa cukup banyak pagawai yang memiliki tingkat Pendidikan sarjana, sehingga diharapkan cukup mampu mendukung kinerja BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja seseorang dimana diharapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang diemban. Sehingga dengan kata lain bahwa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

cukup baik, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar/izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan untuk pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan Golongan seperti terlihat pada diagram berikut ini:



Gambar 5. Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Diagram di atas menunjukkan jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta berdasarkan pangkat dan golongan dimana pegawai terbanyak adalah golongan III/a yaitu sebanyak 17 orang.

GAMBARAN PELAYANAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka BKPSDM Kabupaten Purwakarta sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai.

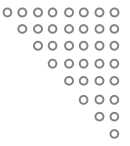
Untuk mewujudkan pelayanan prima BKPSDM Kabupaten Purwakarta mempunyai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM Nomor 800/KEP. 205-BKPSD/2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelayanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.:

Tabel 1.1
Pelayanan di BKPSDM Kabupaten Purwakarta

No.	Jenis Layanan
1.	Legalisir Dokumen Kepegawaian
2.	Legalisir Dokumen Kepegawaian
3.	Penerbitan SK Jabatan Pelaksana



4.	Penerbitan SK Pegawai Honorer (PTT)
5.	Penerbitan SK Pemberhentian Pegawai Honorer (PTT)
6.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara
7.	Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen (Kepegawaian)
8.	Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data Baru)
9.	Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data Pindahan/mutasi)
10.	Pengajuan Perbaikan / Pemutakhiran Data PNS.
11.	Kenaikan Pangkat : Pilihan (Fungsional).
12.	Kenaikan Pangkat : KPO (Reguler).
13.	Kenaikan Pangkat : Penyesuaian Ijazah.
14.	Kenaikan Pangkat : Pilihan (Struktural).
15.	Mutasi Keluar PNS
16.	Mutasi Masuk PNS
17.	Pencantuman Gelar
18.	Perbaikan Dan Penggantian SK Kenaikan Pangkat
19.	Perbaikan Dan Penggantian SK Pengangkatan (PNS)
20.	Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu
21.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.
22.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan.
23.	Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu.
24.	Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Tertentu.
25.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Dari Keterampilan Keahlian.
26.	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.
27.	Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar.
28.	Pengusulan Tugas Belajar.
29.	Penerbitan Surat Izin Seleksi Ijin Belajar.
30.	Penerbitan Surat Izin Belajar.
31.	Penerbitan Surat Keterangan Belajar.
32.	Perbaikan Surat Keputusan/Perintah.
33.	Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan Fungsional.
34.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).
35.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1.



36.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2.
37.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
38.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
39.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan : Administrator.
40.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan : Pengawas.
41.	Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis.
42.	Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional Tertentu.
43.	Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat Di Perangkat Daerah.
44.	Verifikasi Pengajuan Tunjangan Kinerja Daerah Pada Bulan Berjalan.
45.	Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya.
46.	Pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg).
47.	Pengajuan Karis / Karsu.
48.	Pengajuan Kartu Peserta Taspen.
49.	Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).
50.	Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda.
51.	Penerbitan SK Pensiun (APS-Diberhentikan Dengan Hormat).
52.	Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA-Tewas).
53.	Penerbitan SK Pensiun (APS-Cukup Masa Pensiun).
54.	Penerbitan SK Pensiun (APS-Uzur / Sakit).
55.	Penerbitan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS.
56.	Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP).
57.	Pengajuan Sk Petikan Ke 2/3 (Sk Pensiun Hilang).
58.	Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS.
59.	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (usulan/permohonan).
60.	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (temuan).
61.	Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi PNS.
62.	Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).
63.	Fasilitasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana.
64.	Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.



1.5 Aspek Strategi Organisasi

Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mengutamakan pelayanan prima kepada aparatur terkait pelayanan administrasi kepegawaian yang merupakan pendelegasian wewenang pemerintah Kabupaten Purwakarta di bidang kepegawaian. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meningkatkan pendidikan dan pelatihan pegawai dan sinergitas pelayanan dan pengembangan manajemen kepegawaian berbasis sistem informasi cerdas. Sedangkan Arah Kebijakan yang di ambil guna mendukung strategi tersebut adalah Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

1.6 Permasalahan Utama

Isu-isu pelayanan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa peraturan tersebut mengatur manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai.

Hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang, diantaranya:

- a. Masih belum validnya database kepegawaian sehingga belum bisa mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien;
- b. Pemetaan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara jenis jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang diharapkan;
- c. Masih banyaknya inovasi pelayanan publik yang belum berimplikasi pada perbaikan pelayanan secara menyeluruh;
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pelayanan;
- e. Masih terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi;
- f. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia.

1.7 TINDAK LANJUT SAKIP

1.

• REKOMENDASI

1

Adanya penyempurnaan dokumen-dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan indikator kinerja program agar dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.



2

- a. Melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulal jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan.
- b. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi demosi jabatan structural dan fungsional.



3

Agar Terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan data perbandingan capaian target nasional, regional (Provinsi serta menyiapkan informasi permasalahan hambatan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.



2.

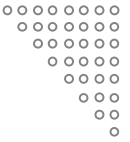
• TINDAK LANJUT

Akan dilakukan penetapan perbaikan dalam indikator kinerja pada Rencana Strategis berikutnya (setelah terpilihnya Bupati definitif) yang lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound) sehingga lebih rasional tidak abstrak dan terukur target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.

- a. Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja, analisis SWOT, dan rencana tindak lanjut.

- b. Telah disusun Berita Acara Baperjakat untuk promosi / mutasi pegawai yang di dalamnya memuat point memiliki kinerja yang cukup baik salah satunya di lihat dari SKP Tahunan dan terdapat dokumentasi saat berlangsungnya rapat tersebut. Dokumentasi ini menunjukkan proses penilaian kinerja pegawai secara objektif.

- a. Kedepannya, dalam penyusunan LAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta dengan capaian target nasional/regional disertai informasi hambatan-hambatan, strategi dan upaya penyelesaiannya.



4

Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada badan.



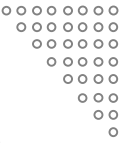
Kedepannya, dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut.

1.8 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang/Register	Kondisi		
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
A.C. Split	27	20	4	3
A.C. Portable	2	2		
Alat Kantor lainnya				
Alat Pemadam/Portable	7	7		
Alat Penghancur Kertas	7	7		
Bracket Standing Peralatan	2	2		
Camera Conference	2	2		
Camera Digital	1		1	
CCTV	2	1	1	
Dispenser	13	11	2	
External/Portable Hardisk	9	9		
Filing Cabinet Besi	12	8	4	
Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	2		
Jam Mekanis	3	3		
Jaringan lainnya	2	2		
Kursi Besi / Mental	9	2	3	4
Kursi Biasa	77	54	8	15
Kursi Kayu	24	24		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3	1	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	12	6	12
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	6	4	
Kursi Kerja Pejabat Eselon V	0	0	0	0
Kursi Putar	4	2	2	
Kursi Rapat	17	17		
Kursi Tamu	17	17		
Lambang Garuda Pancasila	1	1		

Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang/Register	Kondisi		
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
Lampu	3	3		
Laptop	16	11	3	2
Layar Film/Projector	2		1	1
Lemari Besi/Metal	21	21		
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	5		
Lemari Es	3	2	1	
Lemari Kaca	2	2		
Lemari Sorok	11	9	2	
Lukisan	1	1		
Meja ½ Biro	8	8		
Meja Bundar	2	2		
Meja Kerja	59	53	6	
Meja Kerja Kayu	1	1		
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	9		
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	3	1	
Meja Panjang	4	4		
Meja Rapat	10	10		
Meja Resepsionis	1	1		
Mesin Absensi	2	1	1	
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	4	1	1	2
Meubeleur lainnya				
Microphone/Wireless MIC	3	1	1	1
Mini Komputer	0	0	0	0
Note Book	0	0	0	0
Personal Computer	50	28	19	3
Pot Bunga	6	6		
Printer	51	27	10	14
Rak Besi	28	24	4	
Scanner	10	10		
Sofa	6	3	3	
Sound System	5	3	1	1
Speaker Komputer	1	1		
Tablet PC	10	4	4	2
Televisi	7	7		
TV Monitor	4	4		
Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	13	1	5
Vertikal Blind	2	2		
Video Splitter	1		1	
Video Wall Controller	2	2		
Wastafel	1		1	



1.9 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memaparkan pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta selama tahun 2024. Capaian tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LAKIP BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Pelaporan Kinerja
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Aspek Strategi Organisasi
- 1.6 Permasalahan Utama
- 1.7 Tindak Lanjut SAKIP
- 1.8 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.9 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:



Visi Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026:

***"PURWAKARTA CERDAS,
SEHAT DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH"***

MISI KABUPATEN PURWAKARTA:

1

Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.

2

Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

3

Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal.

4

Meningkatkan infrastruktur dan penataan wilayah.

5

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berada pada **Misi 1** yaitu Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah dan **Misi 5** yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Dengan tujuan pertama Meningkatkan Kualitas SDM aparatur, indikator kinerja utama tingkat profesionalisme ASN, sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pegawai dan tujuan kedua Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel. indikator sasarannya adalah capaian SAKIP Kabupaten dan Indeks sistem merit.



Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel.



Sasaran Strategis

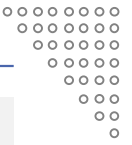
1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pegawai;
2. meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Optimalisasi penerapan sistem merit.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Nomor: KPG/Kep.23-BKPSDM/2024. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode renstra telah ditetapkan, tentang penetapan indikator kinerja utama badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
2.	Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
3.	Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
4.		Sasaran 3 : Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Baik	Baik

Dalam usaha mencapai IKU tersebut, BKPSDM Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. IKK BKPSDM Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:



1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
3	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
5	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
6	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
7	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
8	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
9	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah



10	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
11	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
12	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
13	Persentase Pemberhentian ASN
14	Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
15	Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

2.2.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang di berikan oleh BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Program dan Kegiatan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mengacu ke Permendagri 90 tahun 2019 Sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	A Predikat	32.358.428.518	A Predikat	32.855.654.010	A Predikat	33.360.631.091	15 Dokumen	98.574.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tujuan 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yag Baik, Bersih,Efektif dan Akuntabel	Sasaran 2. Meningkatnya Auntabilitas Publlik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelegaraan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokume n	151.000.000	5 Dokumen	151.000.000	5 Dokumen	151.000.000	15 Dokumen	453.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokume n	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
		5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokume n	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	16.000.000	3 Dokumen	48.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokume n	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	60.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adm Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	14 Laporan	19 Laporan	28.059.428.518	19 Laporan	28.556.654.010	19 Laporan	29.061.631.091	19 Laporan	85.677.683.619	Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	63 Orang/bln	28.004.428.518	63 Orang/bulan	28.5556.654.010	63 Orang/bulan	29.061.631.091	189 Orang/bulan	85.512.713.619	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	18 Laporan	25.000.000	18 Laporan	25.000.000	18 Laporan	25.000.000	54 Laporan	75.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
		5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	185.000.000	2 Dokumen	235.000.000	2 Dokumen	235.000.000	6 Dokumen	655.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	56 Paket	58.000.000	58 Paket	107.500.000	58 Paket	106.000.000	172 Paket	271.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	14.000.000	3 Dokumen	38.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	50.000.000	75 Orang	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	120 Orang	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Laporan	24 Laporan	1.190.000.000	24 Laporan	1.215.000.000	24 Laporan	1.215.000.000	72 Laporan	3.620.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	6 Paket	210.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	200.000.000	6 Paket	200.000.000	6 Paket	200.000.000	18 Paket	600.000.000	BKPSDM
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	3 Paket	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	3 Paket	450.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		5.03.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	6 Paket	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	170.000.000	2 Paket	170.000.000	2 Paket	170.000.000	6 Paket	510.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	36 Laporan	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	175.000.000	36 Laporan	525.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	9 Dokumen	450.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	27 Unit	725.000.000	17 Unit	650.000.000	104 Unit	650.000.000	104 Unit	2.025.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	3 Unit	1.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	75.000.000	-	-	-	-	1 Unit	75.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	22 Unit	200.000.000	13 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	135 Unit	600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	9 Unit	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Laporan	18 Laporan	1.573.000.000	18 Laporan	1.573.000.000	18 Laporan	1.573.000.000	18 Laporan	4.719.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	3 Laporan	9.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	470.000.000	4 Laporan	470.000.000	4 Laporan	470.000.000	12 Laporan	1.410.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	13 Laporan	1.100.000.000	13 Laporan	1.100.000.000	13 Laporan	1.100.000.000	39 Laporan	3.300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	157 Unit	460.000.000	161 Unit	460.000.000	167 Unit	460.000.000	485 Unit	1.380.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	25 Unit	135.000.000	25 Unit	135.000.000	25 Unit	135.000.000	75 Unit	405.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	90 Unit	75.000.000	92 Unit	75.000.000	95 Unit	75.000.000	277 Unit	225.000.000	BKPSDM
		5.03.01.2.09.07	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	BKPSDM
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40 Unit	50.000.000	42 Unit	50.000.000	45 Unit	50.000.000	127 Unit	150.000.000	BKPSDM

		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.050.000.000		6.075.000.000		6.075.000.000		18.200.000.000	BKPSDM
Tujuan 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Sasaran 3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	496 Dokumen	409 Dokumen	1.600.000.000	424 Dokumen	1.600.000.000	439 Dokumen	1.600.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	12.000.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	3 Laporan	450.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	490 Dokumen	400 Dokumen	100.000.000	415 Dokumen	100.000.000	430 Dokumen	100.000.000	1.245 Dokumen	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	900.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	3 Lembaga	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	4 Dokumen	8 Dokumen	2.175.000.000	8 Dokumen	2.200.000.000	8 Dokumen	2.200.000.000	24 Dokumen	6.575.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	5 Dokumen	375.000.000	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	400.000.000	15 Dokumen	1.175.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	3 Dokumen	5.100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ASN	102 Orang	245 Orang	1.275.000.000	255 Orang	1.275.000.000	260 Orang	1.275.000.000	760 Orang	3.825.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasny	83 Orang	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	150 Orang	450.000.000	450 Orang	1.350.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	225.000.000	3 Dokumen	675.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	8 Orang	10 Orang	300.000.000	15 Orang	300.000.000	15 Orang	300.000.000	40 Orang	900.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	-	60 Orang	75.000.000	60 Orang	75.000.000	60 Orang	75.000.000	180 Orang	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

		5.03.02.2.03.14	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Kari	11 Orang	25 Orang	75.000.000	30 Orang	75.000.000	35 Orang	75.000.000	90 Orang	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	3 Laporan	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	6 Laporan	3.000.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	3 Laporan	450.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	10 Orang	200.000.000	10 Orang	200.000.000	10 Orang	200.000.000	30 Orang	600.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	161 Orang	150 Orang	50.000.000	142 Orang	50.000.000	135 Orang	50.000.000	427 Orang	150.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	90 Orang	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	300 Orang	750.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	3 Laporan	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayan	-	15 Dokumen	75.000.000	15 Dokumen	75.000.000	15 Dokumen	75.000.000	45 Dokumen	225.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.425.000.000		1.470.000.000		1.725.000.000		4.620.000.000	BKPSDM
Tujuan 1. Meningkatkan	Sasaran 1. Meningkatnya	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti	25 Orang	50 Orang	525.000.000	55 Orang	525.000.000	60 Orang	525.000.000	60 Orang	1.820.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

n Kualitas SDM Aparatur	Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai			pengembangan Kompetensi teknis										Sumber Daya Manusia
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	25 Orang	50 Orang	525.000.000	55 Orang	570.000.000	60 Orang	725.000.000	60 Orang	1.820.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	3 Laporan	900.000.000	2 Laporan	900.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	7 Laporan	2.800.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabata	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	3 Laporan	900.000.000	2 Laporan	900.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	7 Laporan	2.800.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan berdasarkan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	25
					2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	1,00
					3. Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	51,01
					4. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	2,86
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
3. yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik				
		4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik		6. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	80,88
	3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit			Program Kepegawaian Daerah	7. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	16,99
					8. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat	persen	49,80

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target 2024
					Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
					9. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34
					10. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	172
					11. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	504
					12. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	persen	0,29
					13. Persentase Pemberhentian ASN	persen	5,73
					14. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	persen	2,15
					15. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	persen	100

Pada tahun Anggaran 2024 Rencana kinerja tahunan BKPSDM Kabupaten Purwakarta memiliki 3 Program yaitu 2 program utama dan 1 program penunjang terdiri dari 14 kegiatan, 51 sub kegiatan, rincian sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Program Kepegawaian Daerah	
Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi Teknis



Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

2.2.2 Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah belanja yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dapat tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	URAIAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN
1	Belanja Operasi		
	- Belanja Pegawai	25.327.115.238	22.133.218.520
	- Belanja Barang dan Jasa	12.787.775.280	12.278.553.372
2	Belanja Modal	502.639.000	547.934.000
TOTAL		38.617.529.518	34.959.705.892

Sumber: Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKPSDM Kab. Purwakarta

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian ini telah selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. (perjanjian kinerja terlampir).

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat dibidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Capaian Kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024, Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Renja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

3.1 Capaian Kinerja

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *ouput* kegiatan dan *outcome* program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik.

Perhitungan prosentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2X \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017



3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten purwakarta tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah (<60)	Tinggi (85,31)	150%	Melampaui	BKN Kanreg III
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (80-90)	A (84.40)	100%	Sangat Tinggi	Inspektoral Kab. Purwakarta
3	terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik (76,61 - 88,30)	Sangat Baik (89,57)	113.25%	Melampaui	BKPSDM Kab. Purwakarta
4	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Kategori	Baik (250-324)	Baik (284)	100%	Sangat Tinggi	Penilaian BKN
Rata-Rata						118,87%	Melampaui	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)								
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	25	25	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
2		Persentase ASN yang mengikuti	Persen	1	1.2	120%	Melampaui	Laporan Bidang

		pendidikan dan pelatihan formal						
3		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	51.01	68	133.31%	Melampaui	Laporan Bidang
4		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	Persen	2.86	4.17	145.80%	Melampaui	Laporan Bidang
5.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	80.88	86.48	106.92%	Melampaui	Laporan Bidang
6.		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	16.99	24.36	143.38	Melampaui	Laporan Bidang
7.		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	49.80	71.43	143.43%	Melampaui	Laporan Bidang
8.		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	29	85.29%	Tinggi	Laporan Bidang
9.		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	172	165	95.93%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
10.		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	504	602	119.44%	Melampaui	Laporan Bidang
11.		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persen	0.29	0.26	111.54%	Melampaui	Laporan Bidang
12.		Persentase Pemberhentian ASN	Persen	5.73	5.63	98.25%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
13.		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Persen	2.15	1.83	85.12%	Tinggi	Laporan Bidang
14.		Persentase pengadaan ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang

		sesuai formasi pegawai						
15.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100%	Sangat Tinggi	Inspektoral Kab. Purwakarta
Rata-rata						112,56%	Melampaui	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pengukuran Kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I “Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai” dengan indikator Tingkat Profesionalitas ASN mendapatkan kategori Tinggi dengan poin 85,31 sehingga capaian kinerjanya mencapai 150% dengan target sangat rendah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk menjadikan ASN di Kabupaten Purwakarta lebih professional.
2. Sasaran Strategis II “Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mendapatkan predikat “A” dengan nilai 84.40, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mendapatkan predikat “Sangat Baik” dengan capaian 89,57. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Sasaran Strategis III “Optimalisasi Penerapan Sistem Merit” dengan indikator Indeks Sistem Merit Kabupaten mendapatkan kategori “Baik” dengan nilai 284. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk Meningkatkan Indeks Penilaian Sistem Merit pada tahun berikutnya.

3.1.2 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) antara Renstra BKPSDM Tahun 2023 dengan Renstra BKPSDM Tahun 2024 baik itu sasaran maupun targetnya, hal ini disebabkan beralihnya RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Adapun Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1	Sistem Merit	III (250-324)	III (278)	100%	Baik (250-324)	Baik (284)	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ berinovasi/ teladan/ dedikasi dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	5,08%	9,61%	189%				
3	Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	4	4	100%				
4	Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diaplikasikan dengan baik	3	3	100%				
5	Tingkat Profesionalitas ASN				Sangat Rendah (<60)	Tinggi (85,31)	150%	Melampaui
6	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				A (80-90)	A (84,40)	100%	Sangat Tinggi
7	Indeks Kepuasan Masyarakat				Baik (76,61 - 88,30)	Sangat Baik (89,57)	113.25%	Melampaui
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)								
1.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%	A	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90	81,64%	90,71%				
3.	Persentase penurunan Indisipliner pegawai	3,33	4,46	133,93%				
4.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian yang disosialisasikan	100	100	100%				
5.	Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	100	100	100%				
6.	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/ teladan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan	1,28	2,27	177%				
7.	Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu	4,23	4,62	109,33%				
8.	Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai	0,35	0,34	97,14%	100	100	100%	Sangat Tinggi
9.	Persentase pengisian pemangku Jabatan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, dan jabatan pengawas	100	97,99	97,99%				
10.	Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	100	99,75	99,75%				
11.	Persentase Pelayanan kenaikan pangkat pegawai yang tepat waktu	100	97,69	97,69%				
12.	Persentase data ASN yang mutakhir	100	100	100%				
13.	Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	100	100	100%				

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	100	100	100%				
15.	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar/ lokakarya dan Tugas Belajar	1,53	1,49	97,39%				
16.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,15	11,15	92%				
17.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				25	25	100%	Sangat Tinggi
18.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				1	1.2	120%	Melampaui
19.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				51.01	68	133.31%	Melampaui
20.	Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis				2.86	3.43	119.93%	Melampaui
21.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				80.88	86.48	106.92%	Melampaui
22.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				16.99	24.36	143.38	Melampaui
23.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				49.80	71.43	143.43	Melampaui
24.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah				34	29	85.29%	Tinggi

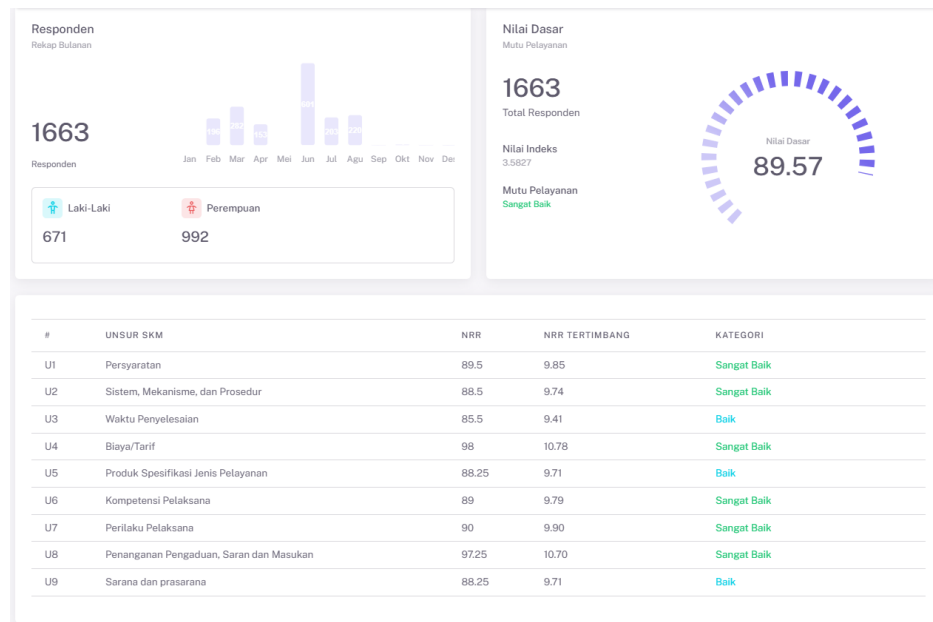
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Kriteria
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah				172	165	95.93%	Sangat Tinggi
26.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				504	602	119.44%	Melampaui
27.	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai				0.29	0.26	111.54%	Melampaui
28.	Persentase Pemberhentian ASN				5.73	5.63	98.25%	Sangat Tinggi
29.	Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa				2.15	1.83	85.12%	Tinggi

Secara keseluruhan, realisasi Capaian kinerja IKU Tahun 2023 adalah 122% atau Melampaui, sedangkan tahun 2024 mencapai 118.87%, mengalami penurunan sebesar 3,13%, dengan rincian:

1. Capaian **Tingkat Profesionalitas ASN** Tahun 2023 mencapai **150%** atau **Sangat Tinggi**, mendapatkan kategori **Tinggi** dengan nilai **85,31 poin**. Adapun rinciannya adalah nilai Dimensi Kualifikasi 20,65 poin, Dimensi Kompetensi 34,35 poin, Dimensi Kinerja 25,31 poin, Dimensi Disiplin 5,00 poin.
2. Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2024 mencapai **100%** atau **Sangat Tinggi** dengan Predikat “A” – Memuaskan dengan nilai **84,40**, mengalami kenaikan 2.6 poin dari tahun 2023 dengan nilai 81,80. Adapun rincian penilaian SAKIP Tahun 2024 adalah

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	26,40
Pengukuran Kinerja	24,00
Pelaporan Kinerja	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	21,25
Jumlah	84,40

3. Capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat** tahun 2024 mencapai **113,25%** atau **Sangat Tinggi** dengan kategori Sangat Baik dengan **indeks 3,58**, nilai dasar **89,57** dan jumlah responden 1.663 orang.



Sumber: yanliksmart.purwakartakab.go.id

Gambar 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

4. Capaian **Indeks Sistem Merit** pada tahun 2024 mencapai 100% atau **Sangat Tinggi**, mendapatkan kategori III **“BAIK”** dengan nilai poin **284** mengalami peningkatan sebesar 6 poin dari tahun 2023 dengan nilai poin 278.

Capaian realisasi IKK pada tahun 2024 mencapai rata-rata **112,56%** atau **Melampaui**, sedangkan capaian IKK pada tahun 2023 mencapai 105,8%, mengalami peningkatan sebesar 6,76%. Rincian capaian diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2024 mencapai 100% atau Sangat Tinggi dengan Predikat “A” – Memuaskan dengan nilai 84,40, mengalami kenaikan 2.6 poin dari tahun 2023 dengan nilai 81,80.
2. Capaian **Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar** mencapai **104,61%** atau **Melampaui** dengan realisasi sebesar 86,48% dari target 80,88%.
3. Capaian **Rasio pegawai Fungsional (%)** (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai **143%** atau **Melampaui**, dengan realisasi sebesar 24,36% dari target 16,99%. Jumlah ASN fungsional diluar Tenaga kesehatan & Tenaga guru sejumlah 602 orang, dengan jumlah keseluruhan pegawai 7782 orang.
4. Capaian **Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)** (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai **143%** atau **Melampaui**, dengan realisasi sebesar 71,43% dari target 49,80%. Jumlah ASN fungsional yg bersertifikat kompetensi terdapat 430 orang diuar Tenaga guru dan Tenaga kesehatan sejumlah 602 orang.

5. Capaian **Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah** mencapai 85,29% atau “Tinggi”, dengan realisasi sebesar 29 Orang dari target 34 Orang.
6. Capaian **Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah** mencapai **95,93%** atau **Sangat Tinggi**. Pertanggal 31 Desember 2024 jumlah Jabatan Administrasi yang terisi sebanyak 165 posisi dari jumlah keseluruhan 172 posisi.
7. Capaian **Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah** mencapai **114,89%** atau **Melampaui**, dengan jumlah 602 Orang dari target 504 Orang.
8. Capaian **Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai** mencapai **111,54%** atau **Melampaui**, dengan realisasi 0,26% dari target 0,29%. Penyelesaian Hukuman Disiplin Tahun 2024 terdiri dari 8 kasus ringan, 2 kasus sedang dan 8 kasus berat.
9. Capaian **Persentase Pemberhentian ASN** mencapai **98,25%** atau **Sangat Tinggi**, dengan realisasi 5,63% dari target 5,73%. Adapun rinci pemberhentian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Pemberhentian	Jumlah
APS	4
BUP KPP	333
BUP Non KPP	25
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia (Janda/Duda) KPP	14
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia (Janda/Duda) NON KPP	10
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Uzur)	2
Pemberhentian Tanpa Hak Pensiun	7
Total	395

10. Capaian **Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa** mencapai **85,12%** atau **Tinggi**, dengan realisasi 1,83% dari target 2,15%. Jumlah pegawai berprestasi pada tahun 2024 berjumlah 5 orang, Pegawai yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 96 orang dan 18 orang masih dalam proses, dan pemberian penghargaan kepada 15 pengelola kepegawaian terbaik.
11. Capaian **Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai** mencapai **100%** atau **sangat tinggi**. Formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 125 jabatan, yang diikuti 2.657 Pelamar dengan status MS dan 402 pelamar dengan status TMS. Formasi PPPK Tahun 2024 sebanyak 535 jabatan, yang diikuti 4.013 Pelamar.
12. Capaian **Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan** mencapai **100%** atau **Sangat Tinggi**.

13. Capaian **Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal** mencapai **120%** atau **Melampaui**. Pada tahun 2024 minat pegawai yang melanjutkan pendidikan meningkat cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pengurusan Ijin Belajar sebanyak 85 orang, Tugas Belajar 41 orang dan Surat Keterangan Belajar 164 orang.
14. Capaian **Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural** mencapai **133,31%** atau **Melampaui**. Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Tinggi Pratama pada tahun 2024 diikuti oleh 2 Orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator diikuti 25 Orang dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diikuti 90 Orang.
15. Capaian **Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis** mencapai **145.80%** atau **Melampaui**. Adapun rinci pelaksanaan diklat fungsional dan diklat teknis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Diklat	Jumlah
Diklat PPNS	2 Orang
Diklat Arsip	5 Orang
Diklat Intelegen	5 Orang
Diklat Perencana	6 Orang
Diklat Barang dan Jasa	50 Orang
Diklat Pamong Praja	4 Orang
Diklat Sekretaris	1 Orang

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	7	7	8
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Tinggi (85,31)	Rendah	139%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	7	7	8
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (84.40)	A	117%
3		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (89,57)	Baik	113,25%
4	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik (284)	Baik	114%
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25.00	30.00	83%
2		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.20	1.15	104%
3		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	68.00	63.85	106%
4		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	4.17	2.86	146%
5	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	86.48	82.67	105%
6		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24.36	17.67	143%
7		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71.43	59.92	119%
8		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	29.00	34.00	85%
9		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	165.00	172.00	96%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	7	7	8
10		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	602.00	524.00	115%
11		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.26	0.21	124%
12		Persentase Pemberhentian ASN	5.63	6.16	91%
13		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	1.83	1.93	95%
14		Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	100.00	100.00	100%
15	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, capaian IKU kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah berhasil mencapai target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026. Sedangkan untuk capaian IKK masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target akan tetapi akan tercapai di akhir periode renstra 2024-2026.

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi dan Instansi Sejenis

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi adalah membandingkan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional dan Provinsi. Dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada penetapan standar nasional kepegawaian, sehingga dalam laporan ini belum dapat disajikan. Adapun data perbandingan yang dapat disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5 dan tabel 3.6.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional

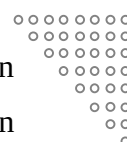
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024		Capaian (%)
				BKPSDM Kab. Purwakarta	Standar Nasional (BKN Pusat)	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,57	96,69	92,6%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Merit Kabupaten	poin	284	380	74,7%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk Indeks Kepuasan Masyarakat mendekati Capaian Standar Nasional (BKN Pusat), namun untuk indeks Sistem Merit yang cukup jauh dari capaian nasional.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Dengan Standar Provinsi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024		Capaian (%)
				BKPSDM Kab. Purwakarta	Standar Provinsi (BKD Provinsi Jawa Barat)	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)						
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Poin	85,31	89,89	95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	84,40	91,40	92%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Sistem Merit Kabupaten	poin	284	400	71%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk IPASN dan



Capaian SAKIP mendekati Capaian Standar Provinsi (BKD Provinsi Jawa Barat), Namun untuk Indeks Sistem Merit cukup jauh dari capaian provinsi. Akan tetapi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta akan selalu berusaha meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan, sehingga mampu mencapai standar Nasional dan Provinsi. Dari kedua tabel tersebut, dapat dilakukan analisa atas faktor keberhasilan dan kekurangannya serta alternative solusi yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Analisa Faktor Keberhasilan dan Hambatan:

- a. Tingginya capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta dan mendekati standar Nasional (BKN Pusat) disebabkan kualitas pelayanan yang baik, respons yang baik terhadap masukan masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai dan keterbukaan informasi terkait layanan dan kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan waktu pelayanan yang kurang cepat. Hal ini disebabkan ada beberapa produk layanan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan memiliki SOP dan cara kerja yang berbeda.
- b. Tingginya capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN dan cukup mendekati standar Provinsi, disebabkan adanya peningkatan Kualifikasi ASN dengan cara mendorong dan memfasilitasi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui program beasiswa, izin belajar, atau pelatihan-pelatihan yang relevan. Kemudian, adanya pengembangan kompetensi yang terarah dengan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan manajemen. Namun, masih terdapat beberapa ASN yang kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- c. Kategori Baik yang dicapai BKPSDM Kabupaten Purwakarta pada indeks Sistem Merit dan cukup mendekati standar Nasional (BKN Pusat) dan Provinsi (Pemprov Jabar). Pemenuhan pada beberapa aspek sudah cukup baik, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta sistem informasi. Namun untuk aspek pengembangan karir masih belum maksimal, seperti menyusun dan melaksanakan diklat sesuai dengan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja.

2. Alternatif solusi yang telah dilakukan:



- a. Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai SOP layanan dan waktu proses layanannya.
- b. Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai pentingnya pengembangan kompetensi dan info-info terupdate tentang pelatihan/bimtek yang akan dilaksanakan/difasilitasi BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
- c. Menyusun dan melaksanakan program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja.

3.1.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Tingkat capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran bisa disebabkan oleh program atau kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.7
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah (<60)	Tinggi (85,31)	150%	Terdapat peningkatan Kualifikasi ASN dengan cara mendorong dan memfasilitasi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui program beasiswa, izin belajar, atau pelatihan-pelatihan yang relevan. Kemudian, adanya pengembangan kompetensi yang terarah dengan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan manajemen. Namun, masih terdapat beberapa ASN yang kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Purwakarta.	Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai pentingnya pengembangan kompetensi dan info-info terupdate tentang pelatihan/bimtek yang akan dilaksanakan/difasilitasi BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (80-90)	A (84.40)	100%	a. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun perlu adanya penyempurnaan dokumen-dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan indikator	a. Telah ditetapkan indikator kinerja pada Renstra tahun 2024-2026 yang lebih rasional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. b. Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
						kinerja program agar dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real. b. Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja juga dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment. Namun tidak melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulal jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan. c. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Serta telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun Agar Terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan data perbandingan capaian target nasional, regional (Provinsi serta menyiapkan informasi permasalahan hambatan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.	c. Kedepannya, dalam penyusunan LAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta dengan capaian target nasional/regional disertai informasi hambatan-hambatan, strategi dan upaya penyelesaiannya. d. Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
						d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga berdampak pada Implementasi SAKIP yang telah meningkat. Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada badan.	
3.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61 - 88,30)	Sangat Baik (89,57)	113.25%	Kualitas pelayanan yang baik, respons yang baik terhadap masukan masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai dan keterbukaan informasi terkait layanan dan kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan waktu pelayanan yang kurang cepat. Hal ini disebabkan ada beberapa produk layanan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan memiliki SOP dan cara kerja yang berbeda.	Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai SOP layanan dan waktu proses layanannya.
4.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik (250-324)	Baik (284)	100%	Pemenuhan pada beberapa aspek sudah cukup baik, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, Perlindungan dan Pelayanan serta sistem informasi. Namun untuk aspek pengembangan karir masih belum maksimal, seperti menyusun dan melaksanakan diklat sesuai dengan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja.	Menyusun dan melaksanakan program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Kualitas SDM aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	1. Tingkat Profesionalitas ASN	150%	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100	Menunjang
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	120	Menunjang
						Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	133,31	Menunjang
						Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	145,8	Menunjang
					Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	Menunjang
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	A Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan:	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja keuangan perangkat daerah	97,75	Menunjang
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	Menunjang
					Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105	Menunjang
					Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	100	Menunjang
					Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	Menunjang
					Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
					Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	64	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
					Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
					Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	Menunjang
					Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Menunjang
		Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	4. Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik	Program Kepegawaian Daerah	2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	106,92	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
						3. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	143,38,	Menunjang
						4. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	143,43	Menunjang
						5. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	85,29	Menunjang
						6. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	95,93	Menunjang
						7. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	119,44	Menunjang
						8. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	111,54	Menunjang
						9. Persentase Pemberhentian ASN	98,25	Menunjang
						10. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	85,12	Menunjang
						11. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100	Menunjang
					Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	99,57	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	98.30	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	102	Menunjang
					Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	114.67	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	100	Menunjang
					Kegiatan: Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Menunjang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
					Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100	Menunjang
					Sub Kegiatan: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100	Menunjang

3.1.6 Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Analisis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. IKU BKPSDM dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta yaitu



SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PROFESIONALITAS PEGAWAI

Tabel 3.9
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Kategori	Sangat Rendah (<60)	Tinggi (85,31)	150%	Melampaui	BKN Kanreg III

Berdasarkan surat Direktur Jabatan ASN BKN Nomor: 310/BM.02/SD/C.II/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional BKN, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 telah selesai dilakukan. Terdapat 4 dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN, adapun nilai Indeks Profesionalitas ASN yang di dapat Pemerintah Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

No.	Dimensi Penilaian	2022	2023
1.	Kualifikasi	21,13	20,65
2.	Kompetensi	36,86	34,35
3.	Kinerja	24,78	25,31
4.	Disiplin	5,00	5,00
	Total	86,01	85,31

Dalam mendukung pencapaian IKU tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) uraian sebagai berikut:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Realisasi capaian indikator kinerja Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 sebesar 100% atau “Sangat Tinggi”.



Gambar 7. Diklat Evaluasi SAKIP



Gambar 8. Diklat Perencanaan dan Penganggaran

2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Realisasi capaian indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 120% atau melampaui. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efektif dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan formal. Antusias yang cukup tinggi dari ASN Kabupaten Purwakarta yang melanjutkan pendidikannya serta penyesuaian pendidikan yang sudah ditempuh. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Rekapitulasi Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Keterangan Belajar

Jenjang Pendidikan	Tugas Belajar	Izin Belajar	Surat Keterangan Belajar
SD	0	0	0
SMP	0	0	2
SMA	0	0	3
DIPLOMA I	0	0	1
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA III	0	0	2
DIPLOMA IV	1	18	17
SARJANA	10	58	66
DOKTOR	1	0	3
PASCA SARJANA	22	6	37
Pendidikan Profesi	1	3	14
Sarjana + Pendidikan	6	0	19
TOTAL	41	85	164

3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Realisasi capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 133,31% atau Melampaui. Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Tinggi Pratama pada tahun 2024 diikuti oleh 2 Orang, Pelatihan Kepemimpinan Administrator diikuti 25 Orang dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diikuti 90 Orang.



Gambar 9. Diklat PKN



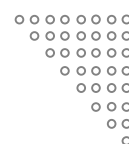
Gambar 10. Diklat PKA**Gambar 11. Diklat PKP**

4. Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis

Realisasi capaian indikator Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis sebesar 145,80% atau melampaui. Adapun rinci pelaksanaan diklat fungsional dan diklat teknis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Rekap Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Tahun 2024

Jenis Diklat	Jumlah
Diklat PPNS	2 Orang
Diklat Arsip	5 Orang
Diklat Intelejen	5 Orang
Diklat Perencana	6 Orang
Diklat Barang dan Jasa	50 Orang
Diklat Pamong Praja	4 Orang
Diklat Sekretaris	1 Orang



Gambar 12. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa



Gambar 13. Diklat Prodi Profesi Pamong Praja



Gambar 14. Diklat PPNS


SASARAN STRATEGIS 2: Optimalisasi Penerapan Sistem Merit

Tabel 3.13
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Tingkat Profesionalitas ASN	Kategori	Baik (250-324)	Baik (284)	100.00	Sangat Tinggi	BKN Pusat

Berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Terdapat 8 Aspek penilaian sistem merit, adapun nilai sistem merit yang di dapat Pemerintah Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai Sistem Merit Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Aspek	2023	2024
1	Perencanaan kebutuhan	40	40
2	Pengadaan	36	38
3	Pengembangan Karir	32,5	45
4	Mutasi dan Promosi	32,5	32,5
5	Manajemen Kinerja	67,5	62,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	37,5	35
7	Perlindungan dan Pelayanan	14	14
8	Sistem Informasi	18	17
Total Akhir Verifikasi		278	284

Secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan total nilai verifikasi dari 278 di tahun 2023 menjadi 284 di tahun 2024. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan Sistem Merit di Kabupaten Purwakarta. Namun, peningkatannya tidak terlalu signifikan, hanya 6 poin.

A. Analisis Keberhasilan:

- 1) Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 32,5 menjadi 45 pada aspek Pengembangan Karir. Ini indikasi positif bahwa upaya pengembangan karir ASN di Purwakarta mengalami kemajuan yang berarti, misalnya tersedianya standar kompetensi jabatan untuk setiap jabatan, Tersedia strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang dan sudah masuk dalam rencana strategi instansi, Tersedia program diklat berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja yang dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu dan Kegiatan coaching dan mentoring dilaksanakan secara terjadwal dan telah dievaluasi hasil coaching dan mentoring.
- 2) Terjadi sedikit peningkatan dari 36 menjadi 38 pada aspek Pengadaan. Ini bisa diinterpretasikan bahwa proses pengadaan ASN mengalami perbaikan, misalnya dalam hal transparansi dan efisiensi. Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian.

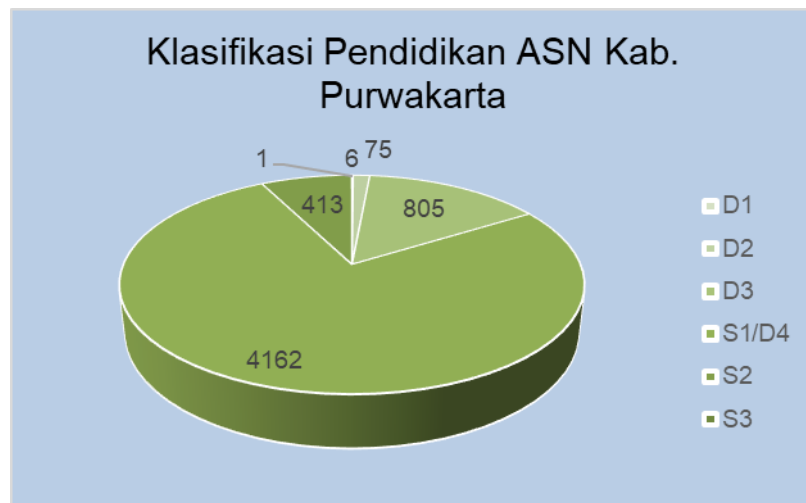
B. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terdapat penurunan pada aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dari 37,5 ke 35. Nilai terendah berada pada informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, agar perlu untuk menganalisis penyebab permasalahan ketidakcapaian kinerja pegawai sehingga dapat diketahui sebab dan dapat disusun strategi penyelesaian permasalahan kinerja pegawai, untuk selanjutnya dilaksanakan.

Dalam mendukung pencapaian IKU tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) uraian sebagai berikut:

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)

Capaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar pada tahun 2024 mencapai 104,61% atau Melampaui dengan realisasi sebesar 86,48% dari target 80,88%.



Sumber: SIMPEG per 31 Desember 2024

Gambar 15. Klasifikasi Pendidikan ASN Kabupaten Purwakarta

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 143% atau Melampaui, dengan realisasi sebesar 24,36% dari target 16,99%. Jumlah ASN fungsional diluar Tenaga kesehatan & Tenaga guru sejumlah 602 orang, dengan jumlah keseluruhan pegawai 7782 orang. Terdapat penambahan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan sebanyak 21 orang lulusan PKN STAN, 6 orang lulusan IPDN dan 1.351 orang yang terdiri dari 992 orang tenaga guru, 300 orang tenaga kesehatan dan 59 orang tenaga teknis yang dilantik sebagai PPPK Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023.



Gambar 16. Pelantikan PPPK Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Capaian Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 143% atau Melampaui, dengan realisasi sebesar 71,43% dari target 49,80%. Jumlah ASN fungsional yg bersertifikat kompetensi terdapat 430 orang diuar Tenaga guru dan Tenaga kesehatan sejumlah 602 orang.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah

Capaian Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah mencapai 85,29% atau “Tinggi”, dengan realisasi sebesar 29 Orang dari target 34 Orang. Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2026, yaitu Direktur RSUD Bayu Asih.



Gambar 17. Pelantikan Direktur RSUD Bayu Asih

5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Capaian Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah mencapai 95,93% atau Sangat Tinggi. Pertanggal 31 Desember 2024 jumlah Jabatan Administrasi yang terisi sebanyak 165 posisi dari jumlah keseluruhan 172 posisi. Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta No.821.29/Kep.373-BKPSDM/2024, sebanyak 33 Pejabat Administrator yang mendapatkan Promosi, mutasi, dan rotasi sebagai bentuk upaya memberikan kesempatan untuk

mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi serta menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif.



Gambar 18. Pelantikan Pejabat Adminstrator

6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Capaian Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mencapai 114,89% atau Melampaui, dengan jumlah 602 Orang dari target 504 Orang. Terdapat penambahan dari dilantiknya 21 orang lulusan PKN STAN, 6 orang lulusan IPDN dan 59 tenaga teknis PPPK kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2023.



Gambar 19. Pelantikan Lulusan P K N - S T A N Dan I P D N

7. Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

Capaian Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai mencapai 111,54% atau Melampaui, dengan realisasi 0,26% dari target 0,29%. Penyelesaian Hukuman Disiplin Tahun 2024 terdiri dari 8 kasus ringan, 2 kasus sedang dan 8 kasus berat.



Sumber: Laporan Bidang Pembinaan per 31 Desember 2024

Gambar 20. Grafik Penyelesaian Hukuman Disiplin Kab. Purwakarta



Gambar 21. Monitoring dan Sosialisasi Pencegahan pelanggaran Netralitas ASN



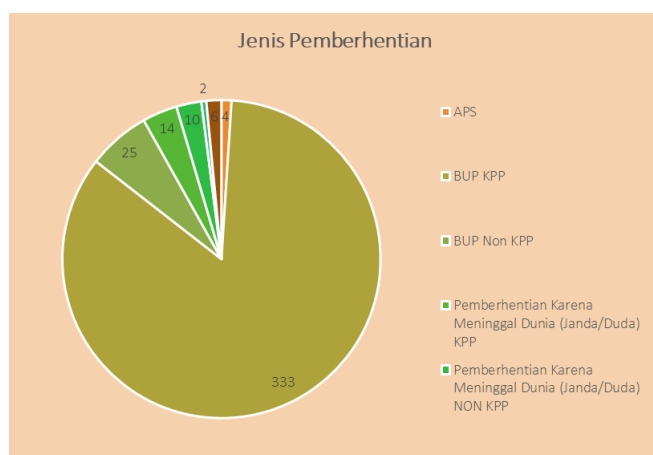
Gambar 22. Rapat Dewan Kehormatan

8. Persentase Pemberhentian ASN

Capaian Persentase Pemberhentian ASN mencapai 98,25% atau Sangat Tinggi, dengan realisasi 5,63% dari target 5,73%. Adapun rinci pemberhentian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

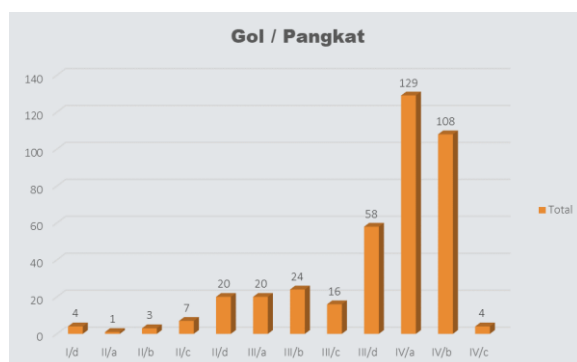
Tabel 3.15
Rekap Rincian Pemberhentian Tahun 2024

Jenis Pemberhentian	Jumlah
APS	4
BUP KPP	333
BUP Non KPP	25
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia (Janda/Duda) KPP	14
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia (Janda/Duda) NON KPP	10
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Uzur)	2
Pemberhentian Tanpa Hak Pensiun	7
Total	395



Sumber: Laporan Bidang Pembinaan per 31 Desember 2024

Gambar 23. Grafik ASN Yang Pensiun Th.2024 Berdasarkan Jenis Pemberhentian



Sumber: Laporan Bidang Pembinaan per 31 Desember 2024

Gambar 24. Grafik ASN Yang Pensiun Th.2024 Berdasarkan Gol/Pangkat

9. Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa

Capaian Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa pada Tahun 2024 mencapai 85,12% atau Tinggi, dengan realisasi 1,83% dari target 2,15%. Jumlah pegawai berprestasi pada tahun 2024 berjumlah 5 orang, Pegawai yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 96 orang dan 18 orang masih dalam proses, dan pemberian penghargaan kepada 15 pengelola kepegawaian terbaik.



Gambar 25. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi Tahun 2024



Gambar 26. Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

10. Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai

Capaian Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai mencapai 100% atau sangat tinggi. Formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 125 jabatan, yang diikuti 2.657 Pelamar dengan status MS dan 402 dengan status TMS. Formasi PPPK Tahun 2024 sebanyak 535 jabatan, yang diikuti 4.013 Pelamar.



Gambar 27. Pelaksana Selkom CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024



SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pencapaian sasaran strategi yang ke-3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang terintegrasi, maka kinerja ini memiliki 2 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

Tabel 3.16
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (80-90)	A (84,40)	100%	Sangat Tinggi	Inspektoral Kab. Purwakarta
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik (76,61 - 88,30)	Sangat Baik (89,57)	113,25%	Melampaui	BKPSDM Kab. Purwakarta

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif sebesar 84,40 dengan predikat A (Memuaskan). Terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,6 poin dari tahun 2022 dengan nilai 81,80. Adapun rincian perolehan nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perolehan Nilai SAKIP Tahun 2023

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	26,40
Pengukuran Kinerja	24,00
Pelaporan Kinerja	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	21,25
Jumlah	84,40



a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki *relative* telah memenuhi standar, memenuhi unsur SMART, sudah terdapat cascading (pohon kinerja) yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, serta *crosscutting* perangkat daerah yang sedikitnya telah dapat menggambarkan aktivitas yang saling terkait antar bidang yang ada dan telah terpublikasikan melalui *website (One Link)*. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan. Namun, masih perlu adanya penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu penetapan indikator kinerja program agar lebih dirasionalisasi baik kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta dan telah berdasarkan SOP. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta. Namun, dalam pengukuran kinerja perlu melampirkan bukti kertas kerja pelaporan dan evaluasi secara berjenjang.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan telah secara rutin dilaksanakan. LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikannya. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya. Namun, perlu penyempurnaan data-data seperti data perbandingan capaian target nasional, regional serta menyajikan

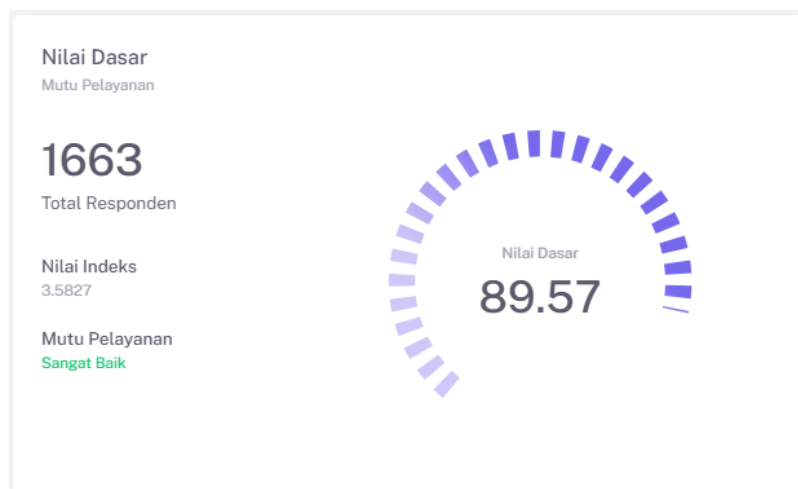
informasi permasalahan, hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang dan telah sesuai dengan mekanisme dalam SOP yang dibuat dan Peraturan Bupati No. 2a Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksananya. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Perangkat Daerah dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta. Survei IKM bertujuan untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan BKPSDM, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan demi peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.



Sumber: yanliksmart.purwakartakab.go.id

Dari gambar 3.22 menunjukkan bahwa Capaian IKM BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebesar 113,25% menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Purwakarta telah memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat. Kategori "Sangat Baik" dengan nilai indeks 3,58 memperkuat indikasi kualitas pelayanan yang tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang mereka terima dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta.

#	UNSUR SKM	NRR	NRR TERTIMBANG	KATEGORI
U1	Persyaratan	89.5	9.85	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88.5	9.74	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	85.5	9.41	Baik
U4	Biaya/Tarif	98	10.78	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	88.25	9.71	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	89	9.79	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	90	9.90	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	97.25	10.70	Sangat Baik
U9	Sarana dan prasarana	88.25	9.71	Baik

Sumber: yanliksmart.purwakartakab.go.id

Gambar 28. Nilai per Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Secara umum, berdasarkan data pada gambar 3.23, pelayanan yang diberikan sudah sangat baik. Namun, ada beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu Waktu Penyelesaian dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, serta Sarana dan Prasarana yang masih dalam kategori "Baik". Upaya perbaikan pada ketiga unsur ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Unsur Biaya/Tarif dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan perlu dipertahankan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya tahun 2024, dapat dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi atas realisasi sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.18
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Sangat Rendah (<60)	Tinggi (85,31)	150%	3.668.619.300	3.526.733.900	96,13%	Kurang Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A (80-90)	A (84,40)	100%	25.760.150.992	14.040.231.755	54,50%	Sangat Efisien
		Baik (76,61 - 88,30)	Sangat Baik (89,57)	113,25%				
3	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Baik (250-324)	Baik (284)	100%	5.494.995.600	4.091.294.560	74,45%	Efisien

Dari tabel 3.14, dapat diketahui bahwa:

- Sasaran 1: Meskipun realisasi capaian kinerja (150%) melampaui target yang ditetapkan, realisasi penggunaan anggaran hampir mencapai target (96,13%). Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai peningkatan kapasitas dan profesionalitas pegawai yang signifikan, anggaran yang digunakan hampir sesuai dengan yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Kurang Efisien". Idealnya, dengan capaian 150%, penggunaan anggaran bisa lebih rendah dari target.
- Sasaran 2: Realisasi kinerja sesuai target (100%), bahkan untuk IKM melampaui target (113,25%). Yang lebih penting, realisasi penggunaan anggaran hanya 54,50% dari target. Ini berarti bahwa target akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat tercapai dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih rendah dari yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Sangat Efisien".
- Sasaran 3: Realisasi kinerja sesuai target (100%) dan penggunaan anggaran 74,45% dari target. Ini menunjukkan bahwa target penerapan sistem merit tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Efisien".



3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024. Adapun jumlah rincian pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Belanja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN	%	FISIK %
1	Belanja Operasi				
	- Belanja Pegawai	22.133.218.520	10.761.698.621	48,62	91
	- Belanja Barang dan Jasa	12.278.553.372	10.384.671.544	84,58	98,8
2	Belanja Modal	547.934.000	511.890.050	93,42	100
TOTAL		34.959.705.892	34.959.705.892		

Sumber: Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKPSDM Kab. Purwakarta

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1,282,598,300	1,197,098,300	1,135,208,000	94.83%
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1,282,598,300	1,197,098,300	1,135,208,000	94.83%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2,820,090,000	2,471,521,000	2,391,525,900	96.76%
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2,820,090,000	2,471,521,000	2,391,525,900	96.76%
	Program Kepegawaian Daerah				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,540,906,000	1,919,416,000	1,900,565,300	99.02%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,000,050,000	1,450,050,000	1,444,677,550	99.63%
4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	225,500,000	225,500,000	216,052,600	95.81%
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	132,356,000	109,057,000	108,782,750	99.75%
6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	183,000,000	134,809,000	131,052,400	97.21%
	Mutasi dan Promosi ASN	1,937,860,000	1,762,830,000	711,836,664	40.38%
7	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	190,000,000	14,970,000	14,970,000	100.00%
8	Pengelolaan Promosi ASN	1,747,860,000	1,747,860,000	696,866,664	39.87%
	Pengembangan Kompetensi ASN	1,286,500,000	1,191,500,000	913,197,050	76.64%
9	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	305,000,000	305,000,000	285,116,450	93.48%
10	Pengelolaan Assessment Center	310,250,000	354,250,000	302,706,200	85.45%
11	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	205,000,000	166,000,000	27,000,000	16.27%
12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	66,250,000	66,250,000	60,975,000	92.04%
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	75,000,000	75,000,000	66,590,000	88.79%
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	250,000,000	150,000,000	104,067,400	69.38%
15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	75,000,000	75,000,000	66,742,000	88.99%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	621,249,600	621,249,600	565,695,546	91.06%
16	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	173,750,000	173,750,000	171,701,746	98.82%
17	Pembinaan Disiplin ASN	347,499,600	347,499,600	315,652,000	90.84%
18	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,000,000	100,000,000	78,341,800	78.34%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		25,760,150,992	14,040,231,755	54.50%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141,776,000	141,776,000	83,454,051	58.86%
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,697,700	46,697,700	26,891,700	57.59%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,070,700	17,070,700	11,216,000	65.70%
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,297,100	14,297,100	9,150,100	64.00%
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,201,000	20,201,000	14,201,751	70.30%
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,509,500	43,509,500	21,994,500	50.55%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,377,121,438	22,183,224,720	10,793,554,321	48.66%
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	15,305,600	15,305,600	15,005,600	98.04%
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,327,115,238	22,133,218,520	10,761,698,621	48.62%
26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,947,200	14,947,200	8,922,000	59.69%
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19,753,400	19,753,400	7,928,100	40.14%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173,746,200	199,433,900	176,183,500	88.34%
28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,812,300	-	-	-
29	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18,330,000	18,330,000	15,181,000	82.82%
30	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39,536,900	39,536,900	29,970,000	75.80%
31	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,000,000	40,000,000	29,945,000	74.86%
32	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61,067,000	101,567,000	101,087,500	99.53%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266,915,000	278,820,150	278,611,200	99.93%
33	Pengadaan Mebel	197,059,000	198,766,200	198,661,200	100.00%
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,856,000	44,113,950	44,010,000	99.76%
35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	-	35,940,000	35,940,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,618,548,180	1,499,227,572	1,283,450,788	85.61%
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411,286,672	291,966,064	228,299,459	32,4%
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,201,261,508	1,201,261,508	1,049,151,329	65,48%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424,220,000	424,220,000	405,513,700	95.59%
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	200,000,000	199,626,000	99.81%
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,660,000	29,660,000	25,860,000	87.19%
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134,800,000	134,800,000	120,519,700	89.41%
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,760,000	59,760,000	59,508,000	99.58%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,950,400	14,950,400	14,950,400	100.00%
43	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14,950,400	14,950,400	14,950,400	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,111,048,400	1,018,498,250	1,004,513,795	98.63%
44	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59,829,000	59,829,000	59,819,000	99.98%
45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,925,000	197,374,850	196,758,850	99.69%
46	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,738,000	30,738,000	30,738,000	100.00%
47	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	150,000,000	145,047,000	96.70%
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95,854,400	95,854,400	95,845,000	99.99%
	Penyediaan Bahan/Material	159,702,000	159,702,000	159,691,000	99.99%
49	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,000,000	-	-	-
50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000	190,000,000	189,911,945	99.95%
51	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35,000,000	35,000,000	27,136,000	77.53%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
52	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000	100,000,000	99,567,000	99.57%



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta telah menyusun LAKIP tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam penetapan kinerja tahun 2023. Penyusunan LAKIP tahun 2024 ini merupakan laporan tahun pertama dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, memperoleh kategori capaian Sangat Tinggi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 118,87%.

Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2024, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. 21.658.260.215- (62,02%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 34.923.765.892 -.

4.2 Saran

Selanjutnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ke depan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan kinerja tahunan agar sesuai dengan Rencana Strategis sehingga target kinerja bisa tercapai dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
3. Meningkatkan penerapan sistem merit di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan sesuai target;
5. Membuat progres maupun pencatatan rencana target dan keberhasilan pencapaian kinerja, hal ini disebabkan karena tim pelaksana kegiatan selama ini belum optimal membuat pencatatan maupun pengikhtisaran terhadap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga pencapaian kinerja tidak dapat tercermin dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Demikian hasil laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Purwakarta pada masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. WAHYU WIBISONO**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**
SUMBER DAYA MANUSIA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : **Pj. BUPATI PURWAKARTA**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Rp. 5.386.515.600	APBD Kabupaten
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 4.102.688.300	APBD Kabupaten
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Rp. 29.128.325.618	APBD Kabupaten
		Rp. 38.617.529.518	

Purwakarta, 05 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimile (0264) 201019, Posel bkpsdmpwk@gmail.com
Laman bkpsdm.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. WAHYU WIBISONO**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : **Pj. BUPATI PURWAKARTA**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN	Sangat Rendah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3.	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten	Baik

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Rp. 5.494.995.600	APBD Kabupaten
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 3.668.619.300	APBD Kabupaten
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Rp. 25.760.150.992	APBD Kabupaten
		Rp. 34.923.765.892	

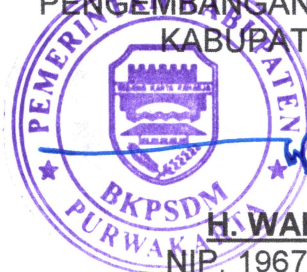
Purwakarta, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
 BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO
 NIP. 19670829 199503 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
SEKRETARIAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
					KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
					s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat										
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat "A"	25,760,150,992	Predikat "A"	-	Predikat "A"	10,561,381,714	3,478,850,041	14,040,231,755	100%	
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			141,776,000				44,345,901	39,108,150	83,454,051		58.86%
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46,697,700	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	4,674,650	22,217,050	26,891,700	100%	57.59%
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,070,700	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8,216,000	3,000,000	11,216,000	100%	65.70%
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14,297,100		1 Dokumen	1 Dokumen	-	9,150,100	9,150,100	100%	64.00%
3.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,201,000	1 Laporan	-	1 Laporan	14,201,751	-	14,201,751	100%	70.30%
3.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43,509,500	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	17,253,500	4,741,000	21,994,500	100%	50.55%
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,183,224,720				8,406,051,855	2,387,502,466	10,793,554,321		48.66%
3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	15,305,600	1 Laporan	-	1 Laporan	15,005,600	-	15,005,600	100%	98.04%
3.1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	22,133,218,520	57 Orang/bulan	-	57 Orang/bulan	8,385,855,055	2,375,843,566	10,761,698,621	91%	48.62%
3.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	14,947,200	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	8,922,000	8,922,000	100%	59.69%
3.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	19,753,400	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	5,191,200	2,736,900	7,928,100	100%	40.14%
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			199,433,900				44,247,500	131,936,000	176,183,500		88.34%
3.1.3.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18,330,000	-	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	7,181,000	15,181,000	100%	82.82%
3.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	39,536,900	-	40 Orang	40 Orang	-	29,970,000	29,970,000	100%	75.80%
3.1.3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	40,000,000	-	30 Orang	30 Orang		29,945,000	29,945,000	120%	74.86%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
					KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
					s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
3.1.3.4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	101,567,000	1 Paket	0	1 Paket	36,247,500	64,840,000	101,087,500	100%	99.53%
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278,820,150				278,611,200	-	278,611,200		99.93%
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	85 Unit	198,766,200	85 Unit	-	85 Unit	198,661,200	-	198,661,200	100%	99.95%
3.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	44,113,950	3 Unit	-	3 Unit	44,010,000	-	44,010,000	100%	99.76%
3.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35,940,000	1 Unit	-	1 Unit	35,940,000	-	35,940,000	100%	100.00%
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,499,227,572				925,833,242	357,617,546	1,283,450,788		85.61%
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	6,000,000	-	6,000,000	100%	100.00%
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	291,966,064	4 Laporan	-	4 Laporan	133,238,887	95,060,572	228,299,459	100%	78.19%
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1,201,261,508	10 Laporan	3 Laporan	13 Laporan	786,594,355	262,556,974	1,049,151,329	100%	87.34%
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			424,220,000				123,391,100	282,122,600	405,513,700		95.59%
3.1.6.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	200,000,000	-	2 Unit	2 Unit	-	199,626,000	199,626,000	100%	99.81%
3.1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	40 Unit	29,660,000	40 Unit	-	40 Unit	25,860,000	-	25,860,000	100%	87.19%
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134,800,000	12 Unit	2 Unit	14 Unit	67,844,100	52,675,600	120,519,700	64%	89.41%
3.1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	59,760,000	85 Unit	-	85 Unit	29,687,000	29,821,000	59,508,000	100%	99.58%
3.1.7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14,950,400				12,850,400	2,100,000	14,950,400		100.00%
3.1.7.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14,950,400	1 Dokumen	-	1 Dokumen	12,850,400	2,100,000	14,950,400	100%	100.00%
3.1.8	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,018,498,250				726,050,516	278,463,279	1,004,513,795		98.63%
3.1.8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59,829,000	1 Paket	-	1 Paket	29,912,000	29,907,000	59,819,000	100%	99.98%
3.1.8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6 Paket	197,374,850	6 Paket	-	6 Paket	187,403,850	9,355,000	196,758,850	100%	99.69%
3.1.8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,738,000	1 Paket	-	1 Paket	30,738,000	-	30,738,000	100%	100.00%
3.1.8.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	1 Paket	-	1 Paket	95,889,000	49,158,000	145,047,000	100%	96.70%
3.1.8.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	95,854,400	2 Paket	-	2 Paket	95,845,000	-	95,845,000	100%	99.99%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
					KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
					s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
3.1.8.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	159,702,000	2 Paket	-	2 Paket	159,691,000	-	159,691,000	100%	99.99%
3.1.8.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	190,000,000	9 Laporan	3 Dokumen	12 Laporan	126,571,666	63,340,279	189,911,945	100%	99.95%
3.1.8.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35,000,000	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	27,136,000	27,136,000	100%	77.53%
3.1.8.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100,000,000	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	99,567,000	99,567,000	100%	99.57%

Sekretaris Badan

DADI SADALI, SE, Kp, MM.
NIP. 19830324 201012 1 002

Purwakarta, 31 Desember 2024
Ketua Tim

HEDI PRIAWAN, SE.
NIP. 19860620 201001 1 001

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta



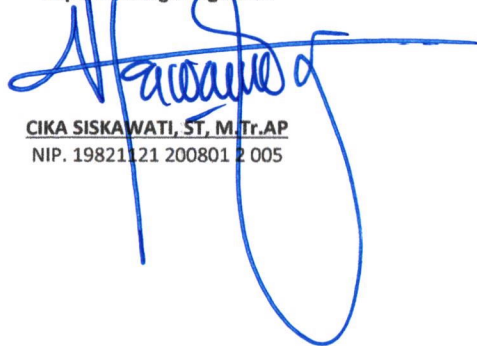
H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PENGADAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten											
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai		100%	1,708,886,000	0%	100%	100%	705,105,080	994,377,620	1,699,482,700	100%	99.45%
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
2.1.1.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1,450,050,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	487,397,230	957,280,320	1,444,677,550	100%	99.63%
2.1.1.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	109,057,000	-	1 Dokumen	1 Dokumen	107,365,450	1,417,300	108,782,750	100%	99.75%
2.1.1.4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	134,809,000	1 Laporan	-	1 Laporan	95,372,400	35,680,000	131,052,400	100%	97.21%
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN												
2.1.2.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Memproses bahan usulan kenaikan pangkat ASN	5 Dokumen	14,970,000	4 Dokumen	1 dokumen	5 Dokumen	14,970,000	-	14,970,000	100%	100%

Purwakarta, 31 Desember 2024

Kepala Bidang Pengadaan



CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP
NIP. 19821121 200801 2 005

Ketua Tim



MARDIAH AFRILLAH, S.Sos, M.AP.
NIP. 19840424 201001 2 030

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW ini	s.d TW ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW ini		
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten											
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		80.88%		85.77%	0.71%	86.48%				107%	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		16.99%		18.97%	5.39%	24.36%				143%	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		49.80%		62.12%	9.31%	71.43%				143%	
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		504 Orang		520 Orang	82 Orang	602 Orang				119%	
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN				532,250,000				153,147,750	172,226,650	325,374,400		61.13%
2.1.3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Menfasilitasi bantuan keuangan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar	5 Orang	166,000,000	1 Orang	4 Orang	5 Orang	12,000,000	15,000,000	27,000,000	100%	16.27%
2.1.3.4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	66,250,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	60,975,000	-	60,975,000	100%	92.04%
2.1.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Melaksanakan pembinaan terhadap ASN Fungsional	60 Orang	75,000,000	60 Orang	0	60 Orang	66,590,000	-	66,590,000	100%	88.79%
2.1.3.6	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Menfasilitasi Uji kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional	25 Orang	150,000,000	17 Orang	8 Orang	25 Orang	13,582,750	90,484,650	104,067,400	100%	69.38%
2.1.3.7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Melaksanakan evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	75,000,000	-	1 Laporan	1 Laporan	-	66,742,000	66,742,000	100%	88.99%

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

DIKKY SUKRIAWIJAYA, S.I.P.
NIP. 19870621 200701 1 003



Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

Purwakarta, 31 Desember 2024

Ketua Tim

DENI SHONJAYA, SE.
NIP. 19801228 201001 1 004

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW Ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai	Tingkat Profesionalitas ASN											
1.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		25 Jam		25 Jam	0	25 Jam				100%	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		1%		1.2%	0	1.2%				120%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		51.01%		48.6%	19.40%	68.0%				133%	
		Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis		2.86%		3.43%	0.00%	3.43%				119.93%	
1.1.1	Pengembangan Kompetensi Teknis				1,197,098,300				977,805,000	157,403,000	1,135,208,000		94.83%
1.1.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan Penyelenggaraan pengembangan Kompetensi ASN	50 Orang	1,197,098,300	60 Orang	-	60 Orang	977,805,000	157,403,000	1,135,208,000	120.00%	94.83%
1.1.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2,471,521,000				1,601,956,700	789,569,200	2,391,525,900		96.76%
1.1.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2,471,521,000	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	1,601,956,700	789,569,200	2,391,525,900	100%	96.76%

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

DIKKY SUKMAWUJAYA, S.IP.
NIP. 19870621 200701 1 003



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

Purwakarta, 31 Desember 2024
Mengetahui,

Ketua Tim

DEDE JUNAEDI, S.Kom.
NIP. 19800810 200902 1 005

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW ini	s.d TW ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW ini		
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten											
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		34 Orang		30 Orang	- 1 Orang	29 Orang				85.29%	
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		172 Orang		168 Orang	-3 Orang	165 Orang				95.93%	
2.1.2	Mutasi dan Promosi ASN												
2.1.2.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Mengelola pengembangan karir dan promosi bagi ASN	1 Dokumen	1,747,860,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	696,866,664	-	696,866,664	100%	39.87%
2.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN												
2.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP	150 Orang	305,000,000	102 Orang	70 Orang	172 Orang	119,927,250	165,189,200	285,116,450	114.67%	93.48%
2.1.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Melaksanakan Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	354,250,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	112,586,200	190,120,000	302,706,200	100%	85.45%

Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia

DIKKY SUKMAWIJAYA, S.IP.
NIP. 19870621 200701 1 003



Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

Purwakarta, 31 Desember 2024
Mengetahui,

Ketua Tim

YUSUP USMAIL, S.Sos.,MM.
NIP. 19781108 200604 1 014

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten				-							
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai		0.29%		0.24%	0.02%	0.26%				111%	
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
2.1.4.2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Melaksanakan sosialisasi E-Kinerja dan netralitas ASN	100 Orang	347,499,600	100 Orang	-	100 orang	240,688,200	74,963,800	315,652,000	100%	90.84%
2.1.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Memproses dan menyelesaikan ASN yang terkena pelanggaran disiplin	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	-	1 laporan	46,985,700	31,356,100	78,341,800	100%	78.34%

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

ACEP YULI MULYA, S.Sos, M.Tr.A.P.

NIP. 19810601 201001 1 009

Purwakarta, 31 Desember 2024

Ketua Tim

DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si.

NIP. 19850929 200412 2 001

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI						% REALISASI	
						KINERJA			ANGGARAN			KINERJA	ANGGARAN
						s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini	s.d TW lalu	TW ini	s.d TW Ini		
2	Optimalisasi Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit Kabupaten				-							
2.1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemberhentian ASN		5.73%		3.59%	2.04%	5.63%				98.25%	
		Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa		2.15%		1.45%	0.38%	1.83%				85.12%	
2.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	360 Dokumen	225,500,000	286 Dokumen	68 Dokumen	354 Dokumen	180,784,600	35,268,000	216,052,600	98.3%	95.81%
2.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
2.1.4.1	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Melaksanakan penyelenggaraan seleksi PNS berprestasi	1 Laporan	173,750,000	1 Laporan	-	1 Laporan	149,863,100	21,838,646	171,701,746	100%	98.82%

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

ACEP YULI MULYA, S.Sos, M.Tr.A.P.
NIP. 19810601 201001 1 009

Purwakarta, 31 Desember 2024

Ketua Tim

ACHMAD IWAN MULYAWAN S.Sos
NIP. 19700304 199803 1 005

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, Posel : bkpsdmpwk@gmail.com
Laman : bkpsdm.purwakartakab.go.id

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Dan Realisasi
Anggaran Triwulan IV tahun 2024
Hari/Tanggal : Kamis / 02 Januari 2025
Waktu : 13.00 s/d selesai
Tempat : Aula BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Peserta Rapat

Ketua : Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Moderator : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Bidang
2. Kepala Sub Bagian
3. Pejabat Fungsional

Kegiatan Rapat:

1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024.
2. Pembahasan :
 - a. Laporan realisasi anggaran pada triwulan IV Tahun 2024 yaitu Rp. 21.658.260.215,00- atau 62,02% dari pagu anggaran Rp. 34.923.765.892,00-. Rendahnya capaian ini dikarenakan tidak terserapnya anggaran pembayaran gaji Calon ASN pengadaan formasi tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000.000, hal ini disebabkan pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2024 sampai saat ini masih berlangsung.
 - b. Sasaran Strategis yang ditetapkan sebanyak 3 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mendapatkan kategori Melampaui dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 118,87%. Capaian Indikator Kinerja Kunci sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 mencapai 112,56%.

- c. Kepala Badan mengucapkan terima kasih atas capaian kinerja dari semua Bidang. Secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori Sangat Berhasil.
- d. Sekretariat Badan memaparkan capaian anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp. 14.040.231.755,00- atau 54,50% dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.760.150.992,00-. Capaian Kinerja (IKK) sudah mencapai 100% dengan capaian SAKIP predikat A.
- e. Sekretariat Badan juga mengingatkan agar bidang-bidang segera menyelesaikan asistensi dan terus berkoordinasi dengan bagian PKP.
- f. Kepala Bidang Pengadaan memaparkan capaian anggaran 99,45,7%. Capaian Kinerja (IKK) sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100%. Pelaksanaan pendaftaran PPPK tahap 2 masih berlangsung dan ada perpanjangan waktu. Masih banyak tenaga honorer dan THL yang belum mendaftar.
- g. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia memaparkan capaian anggaran sebesar Rp 5.136.797.614,- atau 77,8%% dengan pagu anggaran 6.607.979.300. Saat ini bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sedang mempersiapkan pelantikan untuk Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan memaparkan capaian anggaran sebesar Rp. 781.748.146,- atau 92,32% dengan pagu anggaran 846.749.600

Dokumentasi :





Notulis

DEWI PROKLAMASI, SE, MM.
NIP. 19770817 200901 2 002